

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Koperasi adalah sistem ekonomi yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan, yang dimana konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan hanya kemakmuran perseorangan. Koperasi merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. (Himpuni, 2008). Oleh karena itu, Koperasi memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan, dengan demikian koperasi mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Hal ini sesuai Pasal 33 ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

**“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.**

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja sebaik mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip

koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Oleh sebab itu, koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

**“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Berdasarkan Undang – Undang tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi wadah perekonomian yang sesuai dengan bangsa ini, yang berarti kegiatan ekonomi pada umumnya harus bertujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu banyak didirikan koperasi – koperasi untuk memenuhi kebutuhan bersama seperti didirikannya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang bernama Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPKS), yang kemudian disingkat menjadi (KPRI – KPKS).

KPRI - KPKS merupakan koperasi yang bertempat di Jalan Prabu Geusan Ulun no. 75 Kota Sumedang. Dengan Badan hukum 7085/BH/PDD/PAD/KWK.10/III/98. Anggota koperasi tersebut tersebar diseluruh kabupaten Sumedang. Pada koperasi tersebut memiliki beberapa program kerja yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, di bawah ini merupakan daftar program yang kurang optimal dengan memfokuskan pada 3 program kerja yang menarik untuk diteliti :

**Tabel 1.1 Tiga Program Kerja Tahun 2017 Yang Kurang Optimal**

No	Bidang	Permasalahan Program Kerja Kurang Optimal
1	Organisasi dan Manajemen, Diklat dan penyuluhan	Melaksanakan Studi banding ke Koperasi yang sudah maju/mapan baik yang dilaksanakan secara swakelola
2	Bidang Usaha	Simpan Pinjam (terjadi permasalahan pada tingkat kemacetan kredit pada kelompok khusus)
3	Bidang kesejahteraan Anggota, Bidang Sosial dan Umum	Memberikan santunan bagi anak yatim piatu dan bantuan pada korban bencana

*Sumber: Laporan Pengawas dalam RAT KPRI – KPKS Tahun 2017*

Tabel 1.1 menunjukkan program kerja yang kurang optimal, yang mana tidak sesuai dengan teori Myers & G. E. Myers (Ruslan, 1998: 80) bahwa **“Komunikasi memungkinkan seseorang untuk mengkoordinasi suatu kegiatan kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama”**. Dengan tidak tercapainya tujuan tersebut, dengan kata lain terjadi permasalahan pada proses komunikasinya. Dalam penelitian ini komunikasi disampaikan oleh orang yang bersangkutan paut dengan program, yaitu pengawas dan pengurus.

Program kerja yang kurang optimal yang terjadi pada koperasi tersebut yang merupakan suatu permasalahan yang terjadi yang merupakan fenomena permasalahan yang terjadi di koperasi KPRI – KPKS, yaitu program kerja yang sudah disepakati bersama dalam rapat anggota banyak yang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Apabila program terealisasi maka target juga tercapai, saat target tercapai maka layanan untuk pelanggan meningkat yang mengakibatkan kepuasan dalam hal pelayanan untuk anggotapun naik. Bukan hanya itu, efektivitas dalam proses komunikasinya pun sangat berpengaruh dalam terealisasinya program,

seperti halnya menurut Onong Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori & Praktik yang menjelaskan bahwa unsur – unsur dalam berkomunikasi yang efektif adalah *sender, encoding, message, media, decoding, receiver, response, feedback* dan *noise* ”...**unsur komunikasi di atas menegaskan faktor – faktor kunci dalam komunikasi efektif. Komunikator harus tahu khalayak mana yang dijadikan sasaran dan tanggapan mana yang diinginkannya...** ”. (Onong Effendy 1993 : 19)

Hal di atas tidak terlepas dari gangguan – gangguan komunikasi yang terjadi pada gejala tersebut. Karena itu mempengaruhi terhadap terealisasinya program kerja. Menurut Onong Efendi dalam bukunya “Teori & Filsafat Komunikasi, 1993:29” mengatakan bahwa “**...jika seseorang salah komunikasinya (*miscommunication*), maka orang yang dijadikan sasaran mengalami salah persepsi (*misperception*), yang pada gilirannya salah interpretasi (*misinterpretation*), yang pada giliran berikutnya terjadi salah pengertian (*misunderstanding*)...**” yang dapat ditarik simpulan bahwa dalam melakukan komunikasi, seorang pengawas harus benar – benar yakin bahwa informasi yang telah disampaikan sudah dipahami dengan benar agar tidak terjadi masalah seperti penjelasan menurut Onong Efendi sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektifitas operasional perusahaan adalah menerapkan pengendalian internal (Michael, 2008: hal. 29). Cara pengendalian dalam hal ini adalah pengawasan internal oleh pengawas koperasi itu sendiri.

Bagian pengawas pada koperasi harus memiliki peran sebagai fungsi auditor internal. Pengawas melakukan pengawasan untuk menetapkan dan memeriksa

pekerjaan apa saja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Setelah itu, pengawas dapat menilai apakah pekerjaan itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawas juga melakukan pemeriksaan dan penilaian kecocokan antara seluruh kegiatan yang ada di koperasi dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawas juga memeriksa catatan – catatan yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan dan penilaiannya, pengawas dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam mengelola koperasi. Tanggung jawab Pengurus koperasi adalah Pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

Dari rangkaian tugas tersebut pastinya terdapat proses komunikasi yang terjadi untuk memastikan pula suatu program terpantau terealisasinya. Saat komunikasi berjalan dengan baik, maka kegiatan – kegiatan dalam koperasi dapat terkoordinasi dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan program kerja sering terjadi *noise* (gangguan) pada realisasi program kerja yang telah disepakati pada rapat anggota sebelumnya yang akan dilaksanakan selama satu tahun mendatang pada koperasi KPRI - KPKS. Di bawah ini merupakan daftar nama pengawas dan pengurus beserta tugasnya:

**Tabel 1.2 Nama dan Jabatan Pengawas beserta Pengurus**

No	Nama Pengawas	Jabatan	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Yus Suherman, S.Sos.	Ketua	Kosasih	Ketua
2.	Yanti Suryantini, SKM	Sekretaris	H. Aan Sugandi,SKM, M.Si	Wakil Ketua
3.	Enjang Warman, S.Sos	Anggota	Dadang Suhendi, S.Sos, M.Si	Sekretaris
4.	Hj. Wiwi Sukmara, S.Sos. M.Si	Anggota	Utjup Suprijadi, Amd.KL	Wakil Sekretaris
5.	Hj. Tita Ristanti, SE	Anggota	Hj. Rd. Ade Syafiartini, SE	Bendahara

Sumber: Laporan Pengawas Dalam RAT KPRI-KPKS Tahun 2017

Dengan adanya uraian tugas di atas dapat memperjelas *job spesification* setiap pengawas dengan pengurus. Oleh karena itu peran pengawas dengan pengurus sangat berarti untuk mengefektifkan program kerja yang terjadi pada koperasi.

Fenomena di atas belum diketahui secara pasti bagaimana deskripsi proses komunikasi yang dilakukan oleh pengawas kepada pengurus pada pelaksanaan program kerja yang kurang optimal. Sehingga, menimbulkan dugaan bahwa penyebab tidak terlaksananya program kerja tersebut berkaitan dengan proses komunikasi pengawas dengan pengurus. Berdasarkan fenomena yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dengan menentukan judul penelitiannya yaitu: **“Proses Komunikasi Pengawas Dengan Pengurus Pada Pelaksanaan Program Kerja yang Kurang Optimal”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang ditetapkan, maka masalah-masalah yang akan diidentifikasi lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses komunikasi pengawas kepada pengurus pada pelaksanaan program yang kurang optimal di koperasi KPRI – KPKS.
2. Apakah upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh pengawas dengan pengurus pada program yang kurang optimal di koperasi KPRI-KPKS.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan yang dijelaskan di sub bab berikut ini :

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi pengawas secara menyeluruh mengenai upayanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI – KPKS) Tujuan Penelitian.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan proses komunikasi pengawas dengan pengurus pada program kerja yang kurang optimal di KPRI – KPKS.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pengawas dengan pengurus pada program yang kurang optimal di koperasi KPRI-KPKS.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan data-data yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat berguna bagi aspek teoritis maupun aspek guna laksana :

#### **1.4.1. Aspek Teoritis**

1. Dalam aspek ini dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta khususnya yaitu pada bidang manajemen Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan dalam proses komunikasi internal.
2. Penelitian sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta mendeskripsikan suatu permasalahan dan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmu yang telah di pelajari.

#### **1.4.2. Aspek Guna Laksana**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi sebagai bahan masukan untuk lebih mengokohkan lagi koperasi tersebut, sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal pengambilan keputusan mengenai perbaikan proses komunikasi yang ada.